

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Bandar Udara

Transportasi diartikan sebagai kegiatan yang mengangkut atau memindahkan muatan (manusia atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari suatu tempat asal ke tempat tujuan, atau *Origin-Destination*. Berdasar pada pengertian tersebut, maka transportasi udara dapat diberikan definisi, yaitu sebagai kegiatan yang mengangkut atau memindahkan penumpang dan kargo dari suatu bandar udara asal ke bandar udara tujuan, dengan menggunakan pesawat. Pesawat sebagai moda transportasi udara mempunyai karakteristik, yaitu mempunyai kecepatan tinggi dan mampu menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat dilayani oleh moda transportasi lain (Adisasmita, 2014).

Kegiatan lalu lintas transportasi udara dilakukan melalui bandar udara (bandara). Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi (Kepmen Perhubungan Nomor: KM.44 Tahun 2002 dalam (Adisasmita, 2014).

Bandar udara yang berkapasitas besar harus dibangun di atas lahan yang luas dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan fasilitas penunjang lainnya, yang dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu sisi udara dan sisi darat. Sisi darat meliputi gedung terminal

penumpang, terminal kargo, kantor administrator, area parkir dan lainnya. Sisi udara terdiri dari landasan pacu (*runway*), *taxiway* dan *apron* (Adisasmita, 2014).

2.2 Konsep Pembebasan Lahan

Lahan adalah tanah pertanian atau tanah untuk perumahan, atau dengan kata lain lahan adalah tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemilikinya (perorangan atau lembaga) (Jayadinata, 1999). Pengertian lain tentang lahan yaitu salah satu sumberdaya alam yang sangat penting bagi manusia, mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan kehidupannya maupun untuk kebutuhan kegiatan kehidupan sosial, ekonomi dan sosial-budaya. Lahan termasuk jenis sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui karena keberadaannya sebagai keadaan yang berharga (Ritohardoyo, 2013).

Penggunaan lahan adalah interaksi manusia dan lingkungannya, dimana fokus lingkungan adalah lahan, sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah aktivitasnya, aktivitas tersebut adalah kegiatan manusia di permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ritohardoyo, 2013).

Utomo (1992) dalam Munir (2008), menjelaskan bahwa secara garis besar penggunaan lahan dapat digolongkan menjadi dua, yakni :

- 1) Penggunaan lahan dalam kaitan dengan pemanfaatan potensi alamnya, seperti kesuburan, kandungan mineral atau terdapatnya endapan bahan galian di bawah permukaannya.

- 2) Penggunaan lahan dalam kaitan dengan pemanfaatan sebagai ruang pembangunan, dimana tidak memanfaatkan potensi alaminya, tetapi lebih ditentukan oleh adanya hubungan-hubungan tata ruang dengan penggunaan penggunaan lain yang telah ada, di antaranya ketersediaan prasarana dan fasilitas umum lainnya.

Terkait hal tersebut, Utomo (1992) dalam Munir (2008) menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan karakteristik penggunaan lahan, antara lain:

- 1) Faktor sosial dan kependudukan; faktor ini berkaitan erat dengan peruntukan lahan bagi pemukiman atau perumahan secara luas. Secara khusus mencakup penyediaan fasilitas sosial yang memadai dan kemudahan akses akan sarana dan prasarana kehidupan, seperti sumber ekonomi, akses transportasi, akses layanan kesehatan, rekreasi, dan lain-lain.
- 2) Faktor ekonomi dan pembangunan; faktor ini apabila dilihat lebih jauh mencakup penyediaan lahan bagi proyek-proyek pembangunan pertanian, pengairan, industri, penambangan, transmigrasi, perhubungan, dan pariwisata.
- 3) Faktor penggunaan teknologi; faktor ini dapat mempercepat alih fungsi lahan ketika penggunaan teknologi tersebut bersifat menurunkan potensi lahan. Misalnya penggunaan pestisida dengan dosis yang terlalu tinggi di suatu kawasan dapat menyebabkan kerusakan lahan tersebut sehingga perlu untuk dialih fungsi.

4) Faktor kebijaksanaan makro dan kegagalan institusional; kebijakan makro yang diambil oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi seluruh jalannya sistem kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Misalnya kebijakan makro yang memicu terjadinya transformasi struktur penguasaan lahan (struktur agraria), seperti revolusi hijau, program agro-industri, dan eksploitasi hutan.

Dalam memenuhi kebutuhan tanah akan pembangunan infrastruktur, maka pemerintah melakukan pembebasan tanah/pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah (Perpres No 36 Tahun 2005).

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara:

- a. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
- b. pencabutan hak atas tanah

Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Perpres No 36 Tahun 2005). Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan

tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah (Perpres No 36 Tahun 2005).

Ganti rugi yang dimaksud dalam pelepasan tanah adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah (Perpres No 36 Tahun 2005). Bentuk ganti rugi dapat berupa:

- a. uang; dan/atau
- b. tanah pengganti; dan/atau
- c. pemukiman kembali

Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpres No 36 Tahun 2005). Prosedur hukum pengadaan tanah harus disertai dengan pelepasan/penyerahan hak dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain. Pelepasan hak itu sendiri bisa berupa jual beli, penyerahan, hibah atau pencabutan, namun yang berlaku demi kepentingan umum hanya berupa pelepasan hak dalam arti penyerahan dengan imbalan ganti rugi, dan pencabutan hak setelah musyawarah tidak menemukan sepakat (Mekanisari, 2009).

2.3 Konsep Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) dalam Oktama (2013) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki. Menurut Soekanto (2001) dalam Oktama (2013) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Sedangkan menurut Bintarto (1977) dalam Oktama (2013) mengemukakan tentang pengertian kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup, dengan lima parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan.

2.3.1 Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi – potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita – cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan . Lembaga – lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat (Ihsan, 2005).

Pendapat lain tentang pengertian pendidikan dikemukakan oleh (Sumitro, 1998) menyatakan bahwa; “Pendidikan adalah proses dalam

mana potensi-potensi, kemampuan-kemampuan, kapasitas-kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan alat (media) yang disusun sedemikian rupa, dan digunakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan” (Adhanari, 2005).

Tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Ihsan, 2005).

Adapun faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak menurut Mustamin (2013) dapat dibedakan menjadi dua bagian:

1. Faktor individual, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri anak. Misalnya faktor kesehatan, inteligensi, perhatian, bakat, motivasi, dan faktor kepribadian, dan
2. Faktor sosial, yaitu semua faktor yang berada di luar diri anak. Misalnya, faktor tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan keluarga, jumlah anak, lingkungan, dan cara belajar.
3. Faktor Individual, yaitu meliputi: faktor kesehatan, faktor inteligensi, faktor perhatian, bakat, minat, motivasi, dan faktor kepribadian (Mustamin, 2013).
4. Faktor Sosial

a. Tingkat Pendidikan Orang Tua

Tingkat pendidikan orang tua dianggap faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, semakin positif sikapnya terhadap peranan sekolah. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan orang tua itu berkorelasi dengan sikap positif terhadap pendidikan. Selain itu, tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap pekerjaan dan berkorelasi dengan tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula penghasilan yang akan diperoleh. Mereka yang berpendidikan tinggi dapat terserap pada sektor-sektor modern (formal) yang memiliki penghasilan yang lebih besar dibanding dengan sektor tradisional (informal) (Mustamin, 2013).

b. Tingkat Pendapatan Keluarga

Faktor pendapatan keluarga juga menentukan keberhasilan anak mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Anak yang berasal dari keluarga yang status ekonominya tinggi menunjukkan prestasi belajar yang lebih tinggi dan dapat bersekolah lebih lama dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonominya yang rendah. Selain itu, apabila tingkat pendapatan orang tua tinggi, memungkinkan dapat membiayai pendidikan anaknya sampai pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian, anak akan mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi pula (Mustamin, 2013).

2.3.2 Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2013). Jenis pekerjaan ini kemudian dibagi menjadi dua sektor. Model dua sektor ini pertama kali dikembangkan oleh W.A. Lewis. Menurut Lewis, terdapat dikotomi dalam masyarakat di negara-negara terbelakang yaitu adanya dua sektor yang hidup berdampingan, sektor *capital intensive* (industri) dan sektor *labor intensive* (pertanian) (Haryono, 2008).

Kegiatan pertanian merupakan suatu kegiatan manusia yang terdiri dari bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Mubyarto (1989) membagi definisi pertanian kedalam dua pengertian yaitu pertanian dalam arti sempit dan pertanian dalam arti luas (Khaafidh, 2013). Pertanian dalam arti luas, kegiatan pertanian mencakup :

1. Pertanian rakyat (atau disebut sebagai pertanian dalam arti sempit)
2. Perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar)
3. Kehutanan
4. Peternakan
5. Perikanan (termasuk perikanan darat dan perikanan laut)

Pertanian dalam arti sempit diartikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana produksinya berupa bahan makanan utama seperti : beras, palawija (jagung, kacang-kacangan serta

umbui-umbian) dan tanaman-tanaman hortikultura (sayur dan buah-buahan) (Khaafidh, 2013).

Ketika sektor pertanian tidak bisa diharapkan sebagai sumber mata pencaharian tunggal, maka banyak rumah tangga desa, khususnya rumah tangga miskin desa, menyalasi desakan ekonomi dengan cara mendiversifikasikan sumber mata pencaharian. Salah satu cara mendiversifikasi sumber mata pencaharian yang dilakukan oleh rumah tangga desa adalah dengan berpartisipasi di kegiatan ekonomi non-pertanian, baik sebagai mata pencaharian utama maupun mata pencaharian sekunder (Prabowo, 2011).

Kegiatan ekonomi non-pertanian atau *rural non-farm economy activities (RNFE)* memiliki pengertian yaitu segala aktivitas yang memberikan pendapatan (termasuk pendapatan barang) yang bukan merupakan kegiatan pertanian (semua kegiatan produksi makanan primer, bunga, dan serat –meliputi proses tanam, ternak, hortikultura, kehutanan, dan perikanan) dan berlokasi di wilayah pedesaan (Lanjouw (1997) dalam Prabowo (2011)).

Faktor-faktor yang menentukan pilihan individu untuk bekerja baik disektor pertanian maupun non pertanian terdiri dari: pendidikan yang telah ditempuh oleh individu, investasi daerah, usia individu, dan jenis kelamin individu tersebut (Khaafidh, 2013).

Khaafidh (2013) menambahkan faktor yang berpengaruh terhadap keputusan individu untuk bekerja di sektor pertanian adalah usia, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, pendapatan disektor

pertanian, manajemen konservasi lahan dan perolehan kredit pertanian. Utomo (1995) dalam (Idjudin, 2012) mendefinisikan olah tanah konservasi sebagai suatu cara pengolahan tanah yang bertujuan untuk menyiapkan lahan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimum, namun tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan air.

Sedangkan menurut Anim (2011) dalam (Khaafidh, 2013) faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja untuk bekerja dikegiatan pertanian antara lain : pengalaman bertani, jenis kelamin, usia, jenis pertanian, luas lahan garapan, struktur organisasi pertanian, kepemilikan peralatan (mesin) untuk kegiatan pertanian, jumlah anggota rumah tanggayang bekerja diluar kegiatan pertanian, jumlah tanggungan rumah tangga, pendapatan (upah riil), jarak dengan pasar hasil pertanian, serta pengetahuan dan teknologi.

2.3.3 Tingkat Pendapatan

Menurut (Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, 2000) dalam (Rahmawati M. L., 2010) pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Dimana pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan.

Menurut (Gustiyan, 2004) dalam (Ndawa, 2014), pendapatan petani dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usaha tani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar usahatani. Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung dalam per bulan, per tahun, per musim tanam. Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan diluar usahatani seperti berdagang, mengojek, dll.

1. Pendapatan Usaha Tani

Dalam pendapatan usaha tani ada dua unsur yang digunakan yaitu unsur penerimaan dan pengeluaran dari usaha tani tersebut. Penerimaan adalah hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut (Ndawa, 2014).

2. Pendapatan Rumah Tangga Petani

Menurut (Soekartawi, 1990) dalam (Ndawa, 2014), petani di pedesaan khususnya petani kecil sangat tergantung dari pendapatan di sektor non pertanian sehingga kaitan keberhasilan sektor pertanian dan non pertanian di pedesaan menjadi sangat kental. Keluarga pada umumnya terdiri dari seorang kepala keluarga dan beberapa orang

anggotanya. Kepala rumah tangga adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap rumah tangga tersebut, sedangkan anggota keluarga atau rumah tangga adalah mereka yang hidup dalam satu atap dan menjadi tanggungan kepala rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam pengeluaran rumah tangga, struktur pengeluarannya dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah: perubahan pengeluaran menurut waktu, perbedaan antar selera, perbedaan pendapatan dan lingkungan. Perilaku pengeluaran rumah tangga yang tersedia dengan tingkat kemampuan pendapatan yang diperoleh dan bagaimana mendistribusikannya, agar tidak terguncang untuk memenuhi kebutuhan dibawah tingkat kesejahteraan. Pada dasarnya akses kebutuhan rumahtangga terhadap pengeluaran bahan pangan dan bahan bukan makanan yang dibutuhkan sangat tergantung dari daya beli, tingkat pendapatan, harga pangan, proses distribusi, kelembagaan tingkat lokal, maupun kondisi sosial lainnya (Sugiarto, 2008).

Pada umumnya, konsumsi / pengeluaran rumah tangga berupa kebutuhan pangan dan yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bisa terjadi apabila tingkat pendapatan relatif rendah maka terlebih dahulu mementingkan kebutuhan pengeluaran akan memprioritaskan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dibanding bukan makanan. Namun demikian seiring dengan pergeseran dan peningkatan pendapatan, proporsi pola pengeluaran untuk bahan makanan akan menurun dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan non pangan (Sugiarto, 2008).

2.3.4 Tingkat Produktivitas Padi

Keberhasilan pembangunan pertanian dapat menggunakan indikator tingkat kesejahteraan hidup rakyat. Kesejahteraan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah tanggungan keluarga, pendapatan keluarga, umur, tabungan, beban hutang keluarga, dan lokasi tempat tinggal (Hanjani, 2012). Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan menggunakan 4 parameter, yaitu produktivitas, stabilitas, Sustainabilitas, dan Equitabilitas. Namun dalam perencanaan pengembangan wilayah dapat menggunakan 2 parameter yaitu produktivitas dan stabilitas (Taufik, 2012).

Produktivitas adalah kemampuan suatu faktor produksi, seperti luas tanah, untuk memperoleh hasil produksi per hektar. Produksi dan produktivitas ditentukan oleh banyak faktor seperti kesuburan tanah, varietas bibit yang ditanam, penggunaan pupuk yang memadai baik jenis maupun dosis, tersedianya air dalam jumlah yang cukup, teknik bercocok tanam yang tepat dan penggunaan alat-alat produksi pertanian yang memadai dan tersedianya tenaga kerja (Partadiredja, 1980) dalam (Aminuddin, 2009).

Ketersedian sumber daya lahan, air dan iklim merupakan dasar utama untuk menghasilkan produksi pangan secara optimal. Pemahaman karakteristik sumberdaya lahan, air dan iklim merupakan kunci utama keberhasilan dalam produksi tanaman. Karakteristik yang perlu diketahui berupa kesuburan baik fisik, kimia dan biologis, aerasi, ketahanan terhadap erosi (Taufik, 2012).

2.4 Konsep Pelaku Ekonomi Rumah Tangga

Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja. Selain itu, sektor ini memiliki faktor-faktor produksi lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Mereka akan menawarkan faktor-faktor produksi ini kepada sektor perusahaan. Sebagai balas jasa terhadap penggunaan tersebut, maka sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga. Tenaga kerja menerima gaji dan upah, pemilik alat-alat modal menerima bunga, pemilik tanah dan dan harta tetap lainnya menerima sewa atau pendapatan dari harta yang dijual, dan pemilik keahlian keusahawan menerima keuntungan. Berbagai jenis pendapatan tersebut akan digunakan oleh rumah tangga untuk konsumsi, yaitu membeli berbagai barang ataupun jasa yang diperlukan (Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, 2002).

Dari sudut ekonomi, rumah tangga adalah primer sebagai organisasi ekonomi. Hakekatnya kebutuhan dari setiap keluarga sangat relatif dan tidak terbatas, keinginan-keinginan daripada keluarga untuk meningkatkan kualitas kebutuhan hidupnya, akan tetapi penghasilan mereka terbatas, hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga, maka untuk mengimbangkan kebutuhan dan pendapatan mereka mempunyai prinsip bahwa keluarga harus mempunyai perencanaan (merencanakan) anggaran rumah tangga dan meningkatkan penghasilan rumah tangga dan meningkatkan semangat kerja (Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, 2002).

Rumah tangga pertanian adalah rumahtangga yang sekurang-kurangnya satu anggota rumahtangganya melakukan kegiatan bertani atau berkebun, menanam tanaman kayu-kayuan, beternak ikan di kolam, karamba maupun tambak, menjadi nelayan, melakukan perburuan atau penangkapan satwa liar, mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasa pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri (Sensus Pertanian 1993) dalam (Laila Husin, 2011).

